

KAJIAN FISKAL REGIONAL



TRIWULAN I
2019

Penanggung Jawab : Arif Wibawa Ketua Tim : Neil Edwin
Penyusun : Feri Pramusetiyo | Ri Setia Utama | Kurniawan Cahyo
Utomo | Enjun Fajar Sadida | Leonardo Rajagukguk | Melianus

KANWIL DJEN
PERBENDAHARAAN
PAPUA BARAT



KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan limpahan rahmat-Nya, kami dapat menyusun **Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Papua Barat Triwulan I Tahun 2019**. Penyusunan KFR yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (*Treasury Regional Office*) ini, setidaknya melibatkan *Development Economics* sebagai *field study* yang digunakan dalam merekonstruksi metodologi sebagai pendekatan akademik dalam melakukan kajian kebijakan ekonomi pembangunan suatu region. Pengembangan budaya akademik dalam memahami fenomena pembangunan, dengan meletakkan basis *research-based policy*, pada dasarnya merupakan bagian dari budaya kerja organisasi modern. Dengan melakukan pendalaman permasalahan melalui riset, diharapkan akan diperoleh suatu solusi yang seimbang, objective dan komprehensif dalam pengambilan putusan.

Perkembangan pembangunan dan industrialisasi pada negara-negara maju (*developed countries*) mempengaruhi kajian akademik yang direpresentasikan dengan kurikulum universitas yang mengarah tema-tema *research spesifik*, semisal *urban economics*, *environment economics*,

industrial economics, *transportation economics*, *logistic economics*, *regional economics*, dll. Kajian *development economics* kurang menjadi fokus utama, karena era tersebut telah dilalui dan menjadi bagian dari sejarah panjang dialektika pembangunan (*development dialectics*) negara-negara maju.

Kajian Fiskal Regional (*Regional Fiscal Analysis*) ini merupakan studi perkembangan ekonomi pembangunan dari sudut pandang kebijakan fiskal untuk wilayah Provinsi Papua Barat. Variabel utama yang digunakan untuk melakukan analisis pembangunan adalah dengan melakukan studi deskriptif kuantitatif atas data penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam studi ini *outlooks* pembangunan dalam satu tahun dengan memperhatikan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi (*consumption*, *investment*, *government expenditure*, *net export*) dan dampak yang timbul, seperti indeks pembangunan manusia (*human development index*), pemerataan pendapatan (*income equality*), penanggulangan kemiskinan (*poverty alleviation*), pengurangan pengangguran (*unemployment reduction*) dan lain-lain.

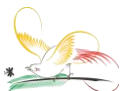


Dengan keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran, masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Akhirnya, kami berharap semoga kajian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak serta dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca semuanya.

Manokwari, 09 Mei 2019
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Papua Barat



Arif Wibawa

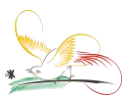


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	1
1. Nilai PDRB	2
2. Pertumbuhan PDRB.....	2
B. NERACA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	2
C. INFLASI.....	3
D. INDIKATOR KESEJAHTERAAN	4
1. Tingkat Kemiskinan.....	4
2. Tingkat Ketimpangan	4
3. Tingkat Pengangguran.....	5
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN	6
A. PENDAPATAN NEGARA	7
1. Penerimaan Perpajakan.....	7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	8
B. BELANJA NEGARA	8
1. Belanja Pemerintah Pusat	8
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).....	9
3. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	9
C. PROGNOISIS REALISASI APBN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2019	10
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD	12
A. PENDAPATAN DAERAH.....	13
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13
2. Pendapatan Transfer	14
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	14
B. BELANJA DAERAH	14
C. PROGNOISIS REALISASI APBD SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2019	15
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN	18
A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN	18
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN	18
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan.....	18
2. Analisis Perubahan	19
3. Analisis Realisasi Pendapatan Perpajakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	19
C. BELANJA KONSOLIDASIAN.....	19
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan.....	19
2. Analisis Perubahan	20
D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH TERHADAP PDRB.....	20



BAB V PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA	20
A. Penyaluran DAK Fisik.....	21
B. Penyaluran Dana Desa.....	22
C. Permasalahan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	23
D. Saran dan Rekomendasi	23
DAFTAR PUSTAKA	25



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Inflasi Bulanan (<i>mtm</i>) Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran s.d Triwulan I Tahun 2019 (%)	4
Tabel 2.1	Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019 dan Triwulan I Tahun 2019	6
Tabel 2.2	Jumlah Penyaluran KUR di Prov. Papua per Skema Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	10
Tabel 2.3	Jumlah Penyaluran KUR di Prov. Papua Barat per Sektor s.d Triwulan I Tahun 2019	10
Tabel 2.4	Jumlah Penyaluran KUR di Prov. Papua Barat per Penyalur s.d Triwulan I Tahun 2019	10
Tabel 2.5	Prognosis Realisasi APBN Prov. Papua Barat s.d Triwulan IV Tahun 2019	11
Tabel 3.1	Total Pagu dan Realisasi APBD Seluruh Pemda Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	12
Tabel 3.2	Prognosis Realisasi APBD Prov. Papua Barat s.d Triwulan IV Tahun 2019	15
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Konsolidasi Tingkat Wilayah Papua Barat Periode Triw I 2018 dan Triw I Tahun 2019	16
Tabel 4.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Papua Barat Triwulan I 2018 – Triwulan I 2019	17
Tabel 4.3	Perbandingan Realisasi Belanja Konsolidasian Provinsi Papua Barat Triwulan I 2018 dan Triwulan I 2019	18
Tabel 4.4	Kontribusi Pemerintah Terhadap PDRB Provinsi Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	18
Tabel 5.1	Pagu dan Realisasi DAK Fisik per Pemerintah Daerah di Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	21
Tabel 5.2	Pagu dan Realisasi Dana Desa per Pemerintah Daerah di Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	23



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Kontribusi Komponen Pembentuk PDRB Papua Barat Sisi Permintaan Triwulan I Tahun 2019 (persen).....	2
Grafik 1.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat dan Nasional Triwulan I Tahun 2019 (yoy, persen).....	2
Grafik 1.3	Perkembangan Nilai Ekspor - Impor Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	3
Grafik 1.4	Perkembangan Inflasi Bulanan Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019 (persen)	3
Grafik 1.5	Tingkat Kemiskinan Papua Barat dan Nasional Tahun 2014 - 2019 (%).....	4
Grafik 1.6	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Papua Barat dan Nasional Tahun 2016 - 2019.....	5
Grafik 1.7	Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Papua Barat Tahun 2014 - 2019	5
Grafik 2.1	Penerimaan Pajak per Kab/Kota di Prov. Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019.....	7
Grafik 2.2	Target dan Realisasi per Jenis Pajak di Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019.....	8
Grafik 2.3	Realisasi per Jenis PNBP di Prov. Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	8
Grafik 2.4	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	9
Grafik 2.5	Pagu dan Realisasi TKDD Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019.....	9
Grafik 2.6	Jumlah Penyaluran KUR per Kab/Kota di Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	9
Grafik 3.1	Total Pagu dan Realisasi PAD Seluruh Pemda Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	13
Grafik 3.2	Total Target dan Realisasi PAD Seluruh Pemda Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2017.....	14
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer per Pemda di Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	14
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah per Pemda di Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019.....	14
Grafik 3.5	Total Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja Seluruh Pemda di Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	15
Grafik 4.1	Realisasi Penerimaan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Papua Barat s.d Triwulan I Tahun 2019	17
Grafik 5.1	Perkembangan Total TKDD Seluruh Pemda Papua Barat Tahun 2017 – 2019 (triliun Rupiah)	20
Grafik 5.2	Komposisi TKDD Papua Barat Tahun 2019 (persen).....	20
Grafik 5.3	Perkembangan Total DAK Seluruh Pemda di Seluruh Pemda Papua Barat Tahun 2015 – 2019 (triliun Rupiah).....	21
Grafik 5.4	Perkembangan Total Dana Desa Seluruh Pemda di Seluruh Pemda Papua Barat Tahun 2017 – 2019 (triliun Rupiah).....	22
Grafik 5.5	Perkembangan Rata-rata Dana Desa per Desa di Papua Barat Tahun 2017 – 2019 (juta Rupiah)	22





Bab I

Perkembangan Ekonomi Regional

Kondisi perekonomian global menuju keseimbangan baru (*rebalancing*) seiring terjadinya perubahan fundamental kebijakan Amerika Serikat (AS). Penguatan kinerja perekonomian AS berdampak pada normalisasi kebijakan moneter berupa kenaikan suku bunga acuan sehingga terjadi peningkatan imbal hasil dan penguatan dolar AS. Implikasinya, sektor keuangan global menjadi lebih volatil disebabkan pembalikan arus modal menuju AS. Ditambah sentimen negatif dari konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga komoditas, terutama komoditas minyak mentah dunia. Seiring hal tersebut, perekonomian negara-negara berkembang pada tahun 2019 masih mengarah kepada pemulihan (*economic recovery*) meskipun lajunya mengalami moderasi jika dibandingkan tahun 2018. Memasuki periode triwulan I 2019, kinerja perekonomian nasional tumbuh moderat pada level 5,07 persen. Sementara itu, kinerja perekonomian Papua Barat mengalami kontraksi sebesar -0,26 persen.

A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa

yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sering dijadikan ukuran terbaik untuk mengukur kinerja perekonomian (Mankiw, 2013). Terdapat tiga cara untuk menghitung PDB. Pertama, dengan menjumlahkan nilai akhir produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Kedua, dengan menjumlahkan pengeluaran agregat, yaitu jumlah dari pengeluaran konsumen, pengeluaran investasi, pembelian pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor dikurangi impor (*net export*). Ketiga, dengan menjumlahkan seluruh pendapatan faktor produksi yang diterima rumah tangga dari perusahaan (Krugman & Wells, 2011).

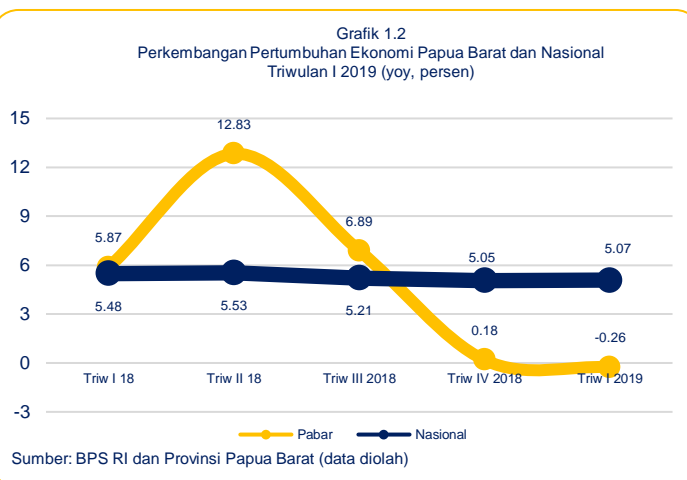
Untuk mengukur PDB, dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (PDB Nominal) dan harga konstan (PDB Riil). Pengukuran PDB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian, sementara itu PDB harga konstan digunakan untuk mengukur kinerja atau pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selanjutnya PDB pada suatu region/wilayah tertentu disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (*Gross Domestic Regional Bruto*).



A.1 Nilai PDRB

Pada triwulan I 2019 nilai PDRB Provinsi Papua Barat mencapai Rp19,9 triliun. Dari nilai tersebut, postur perekonomian Provinsi Papua Barat didominasi oleh dua sektor lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 26,22 persen dan pertambangan penggalan sebesar 17,43 persen yang mengandalkan *raw material resource* berupa pengeboran dan pengilangan gas alam. Papua Barat memiliki cadangan gas alam terbesar yang diekspor ke berbagai negara.

Adapun dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar PDRB Papua Barat Triwulan I 2019 berasal dari Net Ekspor sebesar 37,6 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan LNPRT sebesar 30,7 persen.

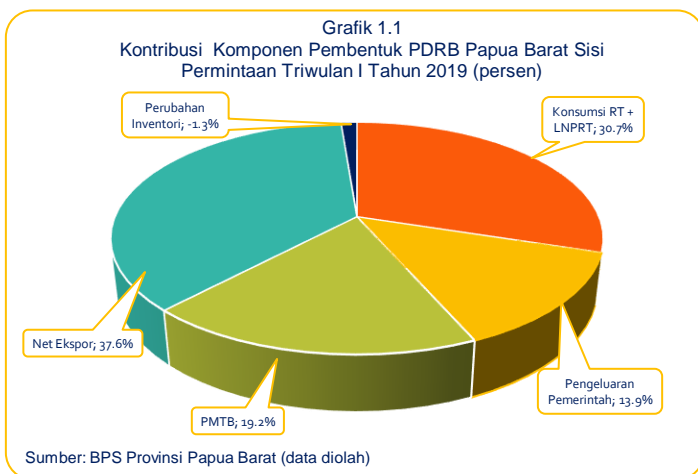


B. NERACA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa lintas batas negara (*international border*). Dengan adanya perdagangan internasional, memungkinkan terjadinya efisiensi yang timbul dari kompetisi antar produsen dalam menjual produk dengan harga yang terendah (*competitive price*) dalam suatu proses permintaan dan penawaran (*supply and demand*) atau dalam suatu mekanisme pasar/ *market mechanism* (Seyoum, 2009).

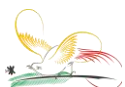
Komponen perdagangan internasional terdiri dari ekspor dan impor. Ekspor merupakan nilai barang dan jasa yang dijual ke luar negeri, sedangkan impor merupakan nilai barang dan jasa yang disediakan untuk dalam negeri. Selisih keduanya merupakan net ekspor atau biasa disebut juga sebagai neraca perdagangan internasional.

Sampai dengan triwulan I 2019, ekspor Papua Barat tercatat sebesar US\$642,6 juta atau turun 1,244,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Nilai ekspor tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar US\$ 247,1 juta sedangkan nilai ekspor terendah terjadi pada bulan Maret sebesar US\$ 173,5 juta. Komoditas ekspor Papua Barat terbesar yaitu *raw material resources* berupa gas alam dan minyak bumi, dengan kontribusi



A.2 Pertumbuhan PDRB

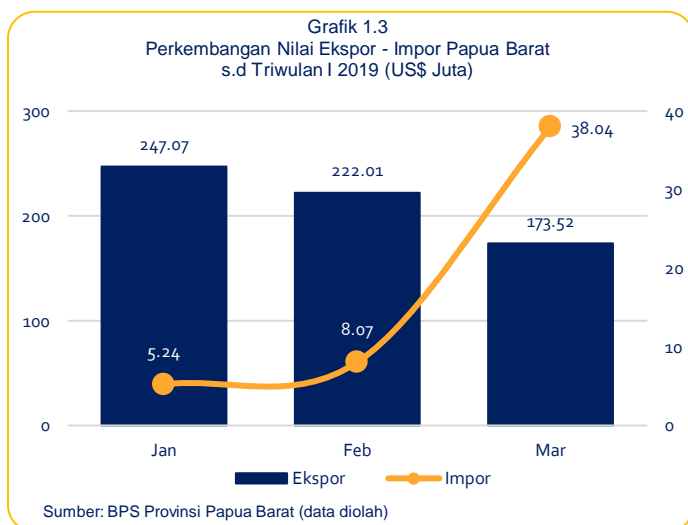
Di saat perekonomian nasional tumbuh moderat pada angka 5,07 persen, perekonomian Papua Barat pada triwulan I 2019 mengalami kontraksi sebesar -0,26 persen. Sebagai dua sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB, industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan negatif -7,01 persen. Adapun sektor pertambangan/ penggalan juga tumbuh negatif sebesar -5,91 persen. Hal ini disebabkan penurunan harga komoditas alam di pasar internasional.



mencapai 98 persen dari total nilai ekspor yang ada. Adapun komoditas ekspor lainnya berupa perhiasan/ permata, kayu, barang dari kayu, garam, belerang, kapur (semen), ikan, udang, daging, ikan olahan, sabun dan preparat pembersih.

Sementara itu, sampai dengan triwulan I 2019 total nilai impor Papua Barat mencapai US\$ 51,4 juta atau naik 2.030,7 persen dari periode yang sama tahun 2018. Impor terbesar berasal dari mesin/ peralatan listrik diikuti oleh golongan mesin–mesin /pesawat mekanik. Nilai impor tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar US\$ 38,04 juta.

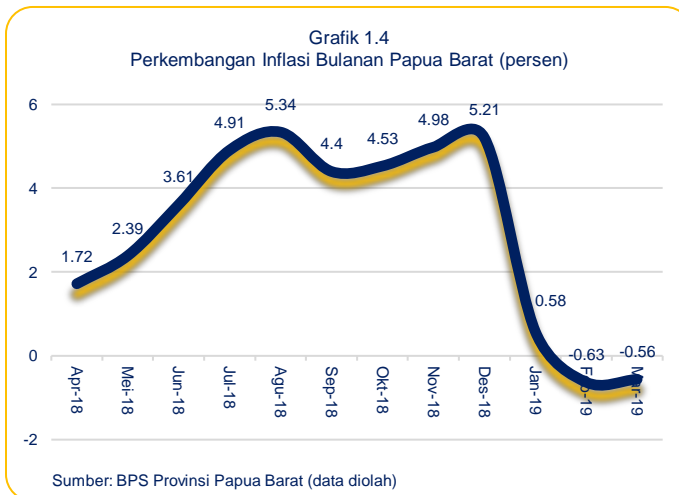
Dari selisih antara nilai ekspor dan impor, sampai dengan triwulan I 2019, nilai neraca perdagangan internasional Papua Barat tercatat surplus sebesar US\$ 591,2 juta.



C. INFLASI

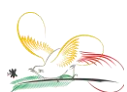
Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum (Mankiw, 2013). Jika kenaikan harga barang hanya berasal dari satu atau dua barang saja, maka tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas dan menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Secara umum, inflasi digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu: inflasi inti (*core inflation*), inflasi makanan yang bergejolak (*volatile food*

inflation) dan inflasi harga yang diatur (*administered price inflation*).



Laju perubahan harga-harga barang/ jasa di Papua Barat pada triwulan I 2019 (Januari – Maret) relatif terkendali dan cenderung bergerak turun (deflasi). Pada bulan Januari, Papua Barat dihadapkan pada tekanan inflasi yang relatif dalam pada level 0,58 persen terutama dipengaruhi komponen *volatile food* (kelompok bahan makanan yang bergejolak). Faktor intensitas curah hujan dan gelombang laut yang relatif tinggi berdampak pada pasokan bahan makanan dan jalur distribusi. Sementara itu, komponen *administered price* ikut tertekan disebabkan kenaikan tarif maskapai penerbangan. Sebaliknya, laju inflasi inti (*core inflation*) relatif terkendali seiring kelompok sandang, makanan jadi, pendidikan mengalami deflasi.

Kemudian pada bulan Februari dan Maret, laju perubahan harga di Papua Barat cenderung menurun. Pada bulan Februari dan Maret terjadi deflasi di Papua Barat masing-masing sebesar -0,63 persen dan -0,56 persen. Pada periode tersebut intensitas curah hujan di Papua Barat mulai berkurang. Faktor tersebut mendukung produktivitas hasil pertanian sehingga pasokan komoditas menjadi berlimpah. Dampaknya, komponen *volatile food* seperti beras, sayur-sayuran dan kacang-kacangan menjadi penyumbang utama deflasi.



Tabel 1.1
Inflasi Bulanan (*mtm*) Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran
s.d Triwulan I 2019 (persen)

Kelompok	jan	feb	mar
Umum	0.58	-0.63	-0.56
Bahan Makanan	0.73	-1.96	-2.98
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	0.62	0.73	0.24
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	0.72	0.09	0.07
Sandang	0.64	-0.68	0.3
Kesehatan	0.66	0.59	1.56
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	0.52	0.29	0.22
Transpor dan Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0.21	-0.71	1.67

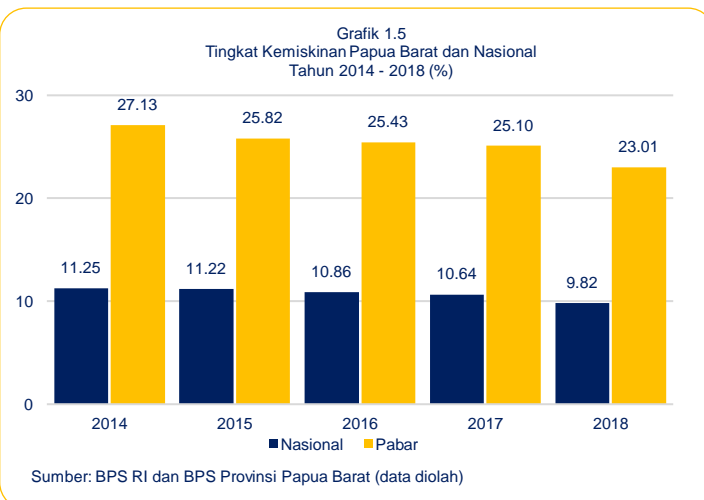
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (data diolah)

D. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Indikator pembangunan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya: Tingkat Kemiskinan, Tingkat Ketimpangan (*Gini Ratio*), dan Tingkat Pengangguran.

D.1 Tingkat Kemiskinan

Sebagaimana terjadi pada sebagian daerah, Provinsi Papua Barat dihadapkan pada masalah kemiskinan yang cukup pelik. Tingkat kemiskinan Papua Barat sangat tinggi, menduduki peringkat kedua nasional setelah Provinsi Papua.



Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Provinsi Papua Barat mencapai 25,43 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,86 persen. Kemudian pada tahun 2018, di saat kemiskinan nasional berhasil turun menjadi *single digit*, tingkat kemiskinan Papua Barat turun menjadi 23,01 persen. Selama beberapa periode ke belakang penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat belum begitu signifikan. Pembangunan yang berlangsung selama ini di Papua Barat tampaknya belum berhasil meningkatkan taraf hidup penduduk keluar dari kemiskinan.

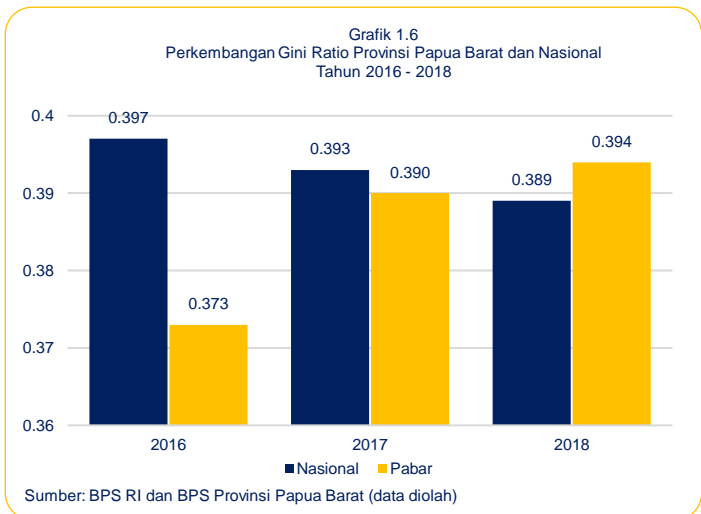
D.2 Tingkat Ketimpangan

Tidak diragukan lagi bahwa pembangunan mengharuskan adanya tingkat pendapatan yang tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan. Namun demikian, tingkat pendapatan yang tinggi perlu didukung oleh indikator utama lainnya yaitu pemerataan distribusi pendapatan. Jika peningkatan pendapatan tersebut hanya melibatkan sebagian kecil orang kaya, maka penanggulangan kemiskinan akan bergerak melambat dan ketimpangan semakin tinggi.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dengan menggunakan Rasio Gini (*Gini Ratio*). Rasio tersebut menggambarkan derajat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu daerah yang nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketidakmerataan sempurna).

Berbeda dengan nasional, tingkat distribusi pendapatan Papua Barat dari tahun 2016 - 2018 semakin timpang, ditandai dengan nilai *gini ratio* yang tercatat semakin tinggi. Pada tahun 2016, *gini ratio* Papua Barat sebesar 0,373. Kemudian nilainya semakin naik menjadi 0,390 pada tahun 2017. Padahal selama dua tahun tersebut, *gini ratio* Papua Barat di bawah pencapaian nasional. Selanjutnya pada tahun 2018, *gini ratio* Papua Barat kembali naik menjadi 0,394.





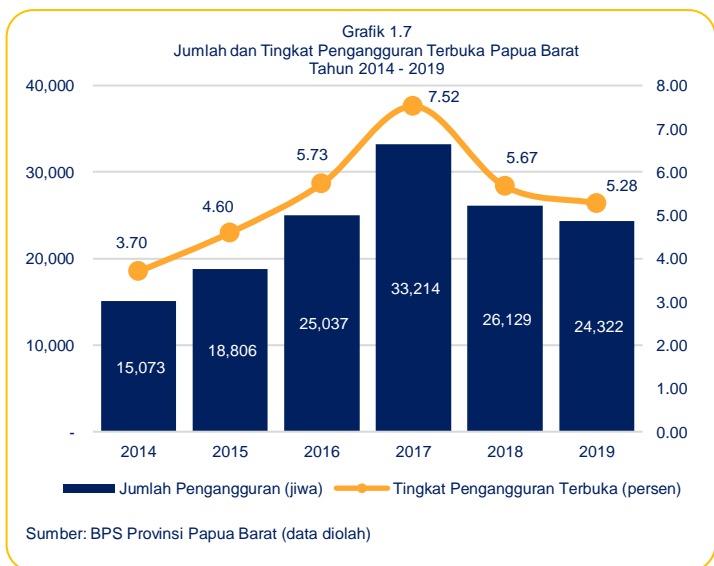
D.3 Tingkat Pengangguran

Secara teoritis, pengangguran memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, hal tersebut mencerminkan penambahan output yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi kapasitas produksi. Arthur Okun (Okun's Law) melalui studinya menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan semakin berkurang (Blanchard, 2006).

Di saat jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran nasional mengalami kenaikan, jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran Papua Barat justru bergerak turun. Selama kurun

lima tahun terakhir pengangguran tertinggi di Papua Barat terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah pengangguran Papua Barat mencapai 33.214 orang dan tingkat pengangguran sebesar 7,52 persen. Kemudian pada tahun 2018 jumlah pengangguran menurun menjadi 26.219 orang dengan tingkat pengangguran berkurang menjadi 5,67 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah pengangguran kembali turun menjadi 24.322 orang dengan tingkat pengangguran mencapai 5,26 persen.

Tampaknya progam pemerintah dalam perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan mampu menekan jumlah dan tingkat pengangguran di Papua Barat. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah daerah dapat menciptakan kesempatan kerja melalui peningkatan keahlian, sertifikasi, pendirian tempat latihan ketrampilan, magang serta meningkatkan inventasi yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.



Bab II

Perkembangan dan Analisis APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menggambarkan kondisi keuangan pemerintah yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dan alokasi belanja pemerintah untuk satu periode tahun anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sebagai gambaran implementasi APBN tahun 2019 sampai dengan triwulan I di Provinsi Papua Barat, dapat dijelaskan dengan membandingkan antara pagu dan realisasi APBN triwulan I tahun 2019 dengan triwulan I tahun 2018.

Target pendapatan negara tahun 2019 di Papua Barat mengalami penurunan sebesar 8,5 persen dibandingkan target tahun 2018, yaitu dari Rp 3.065,08 miliar menjadi Rp2.803,78 miliar. Penurunan

target tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kondisi perekonomian pada tahun 2019 masih

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Papua Barat
s.d Triwulan I Tahun 2019 dan Triwulan I Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	3.065,08	338,13	2.803,78	468,88
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	3.065,08	338,13	2.803,78	468,88
1. Penerimaan Pajak	2.854,25	267,70	2.581,88	388,95
2. PNBPNP	210,83	70,43	221,90	79,94
II. HIBAH	0	0	0	0
B. BELANJA NEGARA	22.101,05	3.909,23	28.511,77	4.754,47
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	5.903,43	793,71	7.699,92	852,88
1. Belanja Pegawai	1.454,67	280,24	1.667,90	336,04
2. Belanja Barang	2.221,38	286,27	2.836,87	362,73
3. Belanja Modal	2.198,62	225,08	3.165,88	152,56
4. Belanja Bantuan Sosial	14,78	2,07	13,38	1,47
5. Belanja Lain-lain	13,98	0,05	15,88	0,07
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	16.197,61	3.115,52	20.811,85	3.901,59
1. Transfer ke Daerah	14.867,89	2.976,33	19.294,94	3.705,96
a. Dana Perimbangan	10.858,96	2.976,33	15.283,84	3.674,30
1) Dana Alokasi Umum	8.024,77	2.658,38	8.290,64	2.751,78
2) Dana Bagi Hasil	1.323,48	247,36	4.319,59	834,52
3) Dana Alokasi Khusus	1.510,70	70,59	2.673,61	88,00
b. Dana Otonomi Khusus	4.008,94	0,00	4.011,10	31,65
2. Dana Desa	1.329,72	139,19	1.516,92	195,63
C. SURPLUS DEFISIT	-19.035,97	-3.571,11	-28.289,87	-4.285,58

Sumber: OM SPAN (data diolah)



dalam tahap pemulihan (*economic recovery*). Tantangan dan dinamika yang cukup berat mengingat volatilitas harga komoditas internasional seperti minyak dan gas bumi turut mempengaruhi target penerimaan pajak di Papua Barat.

Sementara itu, dari aspek belanja negara terdapat kenaikan pagu tahun 2019 sebesar 29 persen dibandingkan pagu tahun 2018, yaitu dari Rp22.101,05 miliar menjadi Rp28.511,77 miliar. Alokasi belanja APBN 2019 yang naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan anggaran di daerah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/ Lembaga dan belanja daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hal ini tercermin dari kenaikan yang cukup signifikan pada pagu belanja barang sebesar 27,7 persen yaitu dari Rp2.221,38 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp2.836,87 miliar pada tahun 2019 disebabkan pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pemilu.

Di samping itu, adanya kenaikan gaji PNS tahun ini yang berakibat pada kenaikan pagu belanja pegawai, turut andil dalam peningkatan pagu belanja APBN secara keseluruhan. Selain itu, pembayaran THR PNS tahun 2019 yang meliputi komponen tunjangan keluarga, tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja. Pada tahun 2019, pagu belanja pegawai naik sebesar 14,7 persen yaitu dari Rp1.454,67 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp1.667,90 miliar pada tahun 2019.

Sementara itu, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada pagu belanja modal dari Rp2.198,62, miliar pada tahun 2018 menjadi Rp3.165,88 miliar pada tahun 2019 atau naik hampir sebesar 43,9 persen. Hal ini disebabkan penambahan proyek-proyek infrastruktur strategis di Papua Barat.

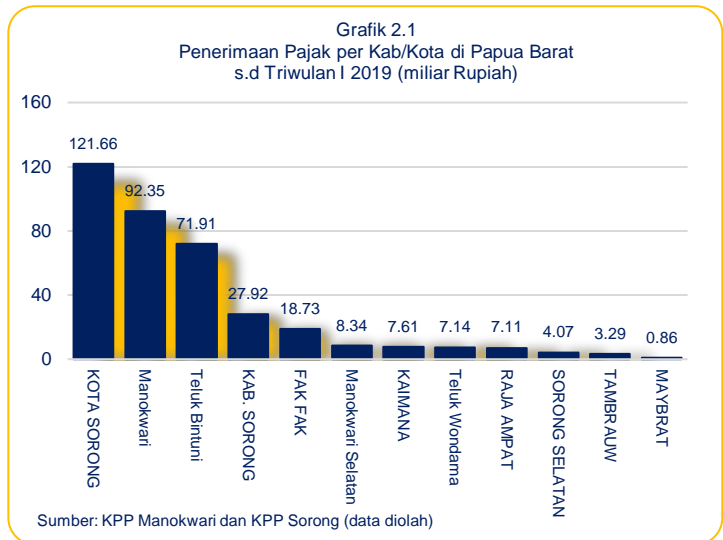
Selanjutnya, dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan belanja sampai dengan triwulan I 2019, dapat disimpulkan bahwa terdapat

defisit anggaran sebesar Rp4.285,58 miliar yang disebabkan target penerimaan yang belum tercapai. Sampai dengan triwulan I 2019, realisasi penerimaan APBN relatif masih rendah mencapai 16,7 persen. Namun kinerja tersebut masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Sementara itu, realisasi belanja APBN mencapai 16,6 persen dimana kinerjanya relatif sama dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

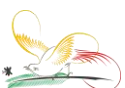
A. PENDAPATAN NEGARA

A.1 Penerimaan Perpajakan

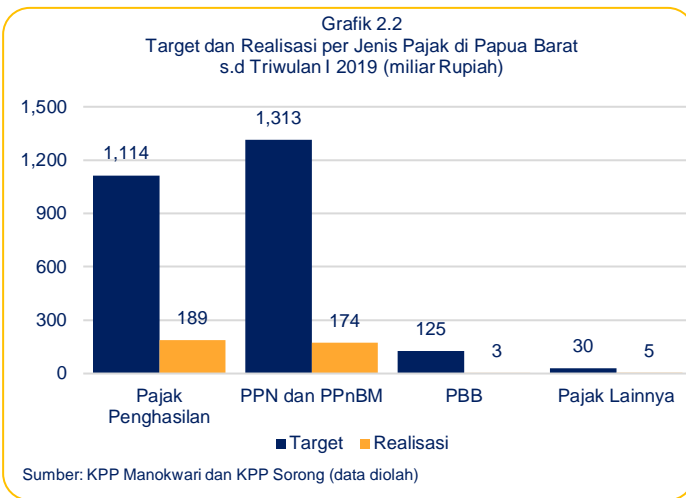
Penerimaan perpajakan di Papua Barat hanya berasal dari penerimaan pajak dalam negeri yang terdiri atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya.



Total penerimaan perpajakan di Papua Barat sampai dengan triwulan I 2019 berjumlah Rp371 miliar. Pada periode ini, daerah yang memiliki penerimaan pajak terbesar yaitu Kota Sorong, Kab. Manokwari dan Kab. Teluk Bintuni masing-masing sebesar Rp121,7 miliar; Rp92,4 miliar dan Rp71,9 miliar. Sebagai pusat perekonomian di Papua Barat, Kab. Manokwari dan Kota Sorong merupakan daerah yang paling maju sehingga banyak potensi penerimaan pajak yang diperoleh



dari kedua daerah tersebut. Adapun Kab. Teluk Bintuni merupakan salah satu daerah penghasil gas alam terbesar dalam skala nasional.



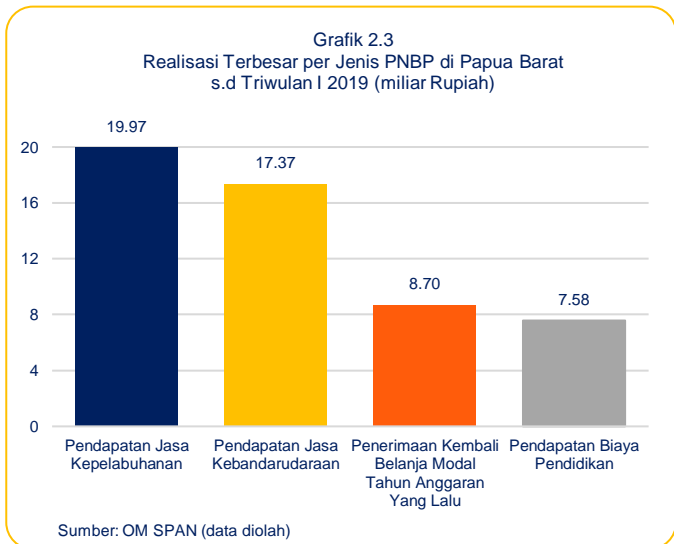
Sementara itu, daerah-daerah lain di Papua Barat sampai dengan triwulan I 2019 memiliki penerimaan pajak relatif kecil. Penerimaan pajak terendah yaitu Kab. Maybrat sebesar Rp860 juta dan Kab. Pegunungan Arfak yang sama sekali belum terdapat penerimaan perpajakan. Sebagai daerah pemekaran baru, Kab. Pegunungan Arfak belum mempunyai sumber pajak potensial di daerahnya. Adapun Kab. Maybrat merupakan daerah yang relatif tertinggal, sehingga memerlukan perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan potensi perekonomiannya.

Berdasarkan jenisnya, sampai dengan triwulan I 2019 realisasi penerimaan pajak terbesar di Papua Barat adalah pajak penghasilan yang mencapai Rp188,65 miliar atau 51 persen dari total realisasi, dengan kontribusi terbesar yaitu PPh pasal 21 mencapai Rp98,5 miliar. Kemudian realisasi penerimaan pajak terbesar kedua yaitu PPN dan PPnBM sebesar Rp174,2 miliar atau 47 persen dari total realisasi, dengan kontribusi terbesar PPh Pasal 21 mencapai Rp184,4 miliar.

A.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan

perpajakan. Realisasi PNBP di Papua Barat sampai dengan triwulan I 2019 mencapai Rp79,94 miliar (36 persen dari target), lebih baik dari periode yang sama tahun 2018. Kontribusi terbesar pada periode ini didapat dari sektor jasa transportasi yaitu pendapatan jasa kepelabuhanan sebesar Rp19,97 miliar dan pendapatan jasa kebandarudaraan sebesar Rp17,37 miliar.

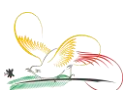


B. BELANJA NEGARA

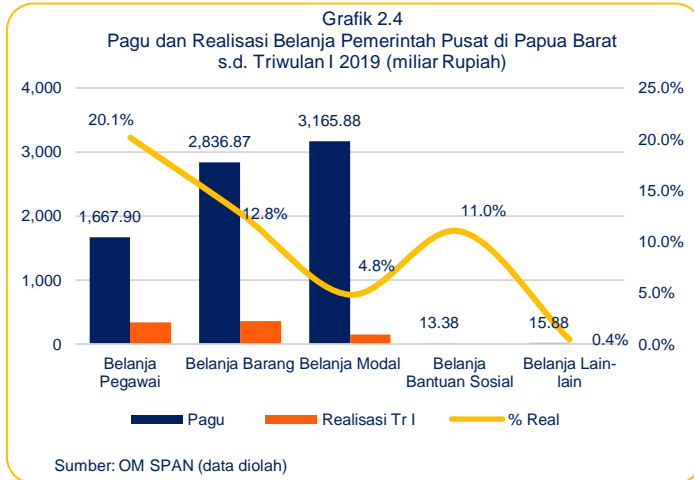
Sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah (*government expenditure*) dapat dijadikan sebagai alat ungkit (*leverage*) dalam bentuk stimulus fiskal. Kebijakan penganggaran pada K/L untuk wilayah Papua Barat diprioritaskan dengan mengakselerasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.

B.1 Belanja Pemerintah Pusat

Total pagu belanja pemerintah pusat di Papua Barat mengalami kenaikan sebesar 30 persen, yaitu dari Rp5.903,43 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp7.699,92 miliar pada tahun 2019. Alokasi tertinggi dimiliki belanja modal mencapai Rp3.165 miliar (41 persen dari total pagu belanja)



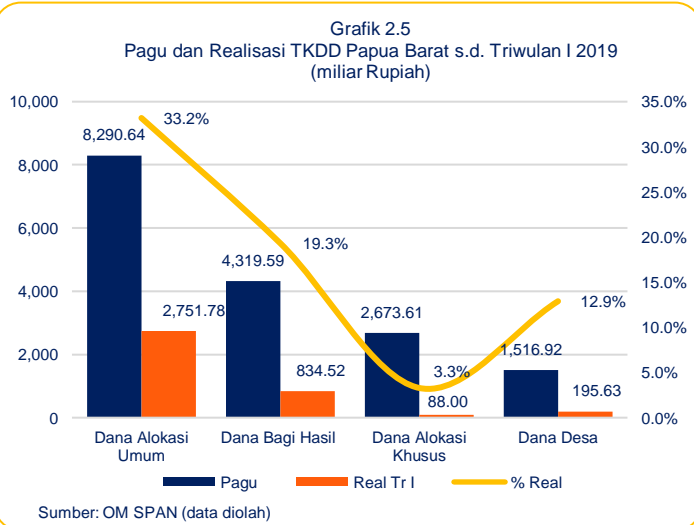
dan belanja barang sebesar Rp2.836,87 miliar (37 persen dari total pagu belanja).



Sampai dengan triwulan I 2019, realisasi belanja tertinggi yaitu belanja pegawai mencapai 73,0 persen dan belanja barang mencapai 55,1 persen. Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai 50,1 persen dan belanja bantuan sosial mencapai 49,8 persen. Adapun realisasi belanja terendah yaitu belanja lain-lain yang baru mencapai 19,3 persen.

B.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Total pagu alokasi TKDD yang diperuntukkan bagi seluruh pemerintah daerah di Papua Barat mengalami kenaikan sebesar 28,5 persen yaitu dari Rp16.197,61 miliar pada tahun 2018, menjadi Rp20.811,85 miliar pada tahun 2019. Alokasi

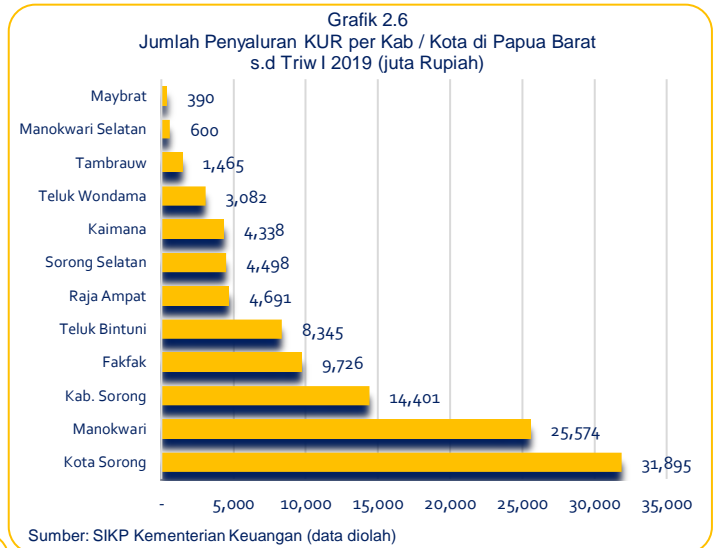


anggaran terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp8.290,64 miliar (47,4 persen dari total pagu alokasi TKDD).

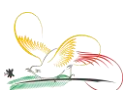
Sampai dengan triwulan I 2019, realisasi TKDD di Papua Barat mencapai Rp3.901,59 miliar atau 19 persen dari total pagu alokasi TKDD. Realisasi TKDD tertinggi yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil masing-masing mencapai 33,2 persen dan 19,3 persen dari pagu masing-masing. Adapun realisasi terendah yaitu Dana Alokasi Khusus sebesar 3,3 persen dari pagu.

B.3 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sampai dengan triwulan I 2019 jumlah penyaluran KUR di Provinsi Papua Barat sebesar Rp105 miliar yang diberikan kepada 3.066 debitur.



Daerah dengan jumlah penyaluran KUR terbesar yaitu Kota Sorong sebesar Rp31,9 miliar. Selanjutnya, daerah dengan penyaluran KUR terbesar kedua yaitu Kab. Manokwari sebesar Rp25,6 miliar. Kemudian penyaluran KUR terbesar ketiga yaitu Kab. Sorong sebesar Rp14,4 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa persebaran penerima KUR di Papua Barat sebagian besar berada di daerah yang kondisi perekonomiannya relatif lebih maju.



Jika dilihat per skema penyaluran, sampai dengan triwulan I 2019 jumlah penyaluran KUR tertinggi di Papua Barat yaitu KUR Mikro sebesar Rp62,8 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 2.809 nasabah. Sementara itu untuk penyaluran KUR Kecil sebesar Rp46,2 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 255 nasabah. Adapun penyaluran KUR TKI sebesar Rp28 juta dengan jumlah debitur sebanyak 2 (dua) orang nasabah.

Tabel 2.2
Penyaluran KUR di Papua Barat per Skema s.d Triwulan I 2019

Skema	Debitur	Penyaluran (Rp)	Outstanding (Rp)
Kecil	255	46,170,400,000	17,043,462,911
Mikro	2,809	62,807,355,024	16,286,891,191
TKI	2	28,000,800	8,083,692
Jumlah	3,066	109,005,755,824	33,338,437,794

Sumber: SIKP Kementerian Keuangan (data diolah)

Jika dilihat per sektor, perdagangan merupakan sektor yang memiliki jumlah penyaluran KUR terbesar. Sampai dengan triwulan I 2019, penyalurannya sebesar Rp69,1 miliar dengan

Tabel 2.3
Penyaluran KUR di Papua Barat per Sektor s.d Triwulan I 2019

Sektor	Debitur	Penyaluran (Rp)	Outstanding (Rp)
Industri Pengolahan	106	3,880,000,000	744,993,548
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	223	7,696,000,800	2,732,976,561
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12	288,000,000	83,055,646
Konstruksi	6	550,000,000	466,666,705
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	75	4,293,000,000	1,460,825,649
Perdagangan Besar dan Eceran	1,863	69,121,355,024	21,413,378,746
Perikanan	128	3,931,000,000	1,182,362,877
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	428	10,809,000,000	2,678,242,584
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	55	3,935,000,000	1,803,721,380
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	170	4,502,400,000	772,214,098
Jumlah	3,066	109,005,755,824	33,338,437,794

Sumber: SIKP Kementerian Keuangan (data diolah)

jumlah debitur sebanyak 1.863 nasabah. Kemudian diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp10,8 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 428 nasabah. Melihat kondisi tersebut, perlu perluasan jangkauan ke sektor lainnya yang lebih produktif seperti sektor perikanan dan industri pengolahan. Hal ini dikarenakan perluasan kepada sektor produktif lebih menggerakkan roda perekonomian Papua Barat.

Jika dilihat dari lembaga penyalur, terdapat enam bank penyalur KUR di Papua Barat yaitu BRI, Mandiri, BNI, BPD Papua. BRI merupakan bank penyalur KUR terbesar baik dari sisi jumlah debitur maupun jumlah kredit yang disalurkan. Sampai dengan triwulan I 2019, dana KUR yang telah disalurkan oleh BRI sebesar Rp77,3 miliar dengan jumlah debitur mencapai 2.766 orang. Sementara itu, dana KUR yang telah disalurkan oleh Bank Mandiri sebesar Rp5,9 miliar dengan jumlah debitur mencapai 77 orang. Adapun BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp15,6 miliar dengan jumlah debitur mencapai 107 orang. Sedangkan BPD Papua telah menyalurkan KUR sebesar Rp10,3 miliar kepada 116 debitur

Tabel 2.4
Penyaluran KUR di Papua Barat per Penyalur s.d Triwulan I 2019

Nama Bank	Debitur	Penyaluran (Rp)	Outstanding (Rp)
BPD Papua	116	10,237,400,000	8,115,888,877
Mandiri	77	5,855,355,000	5,668,315,797
BNI	107	15,613,000,800	1,875,879,337
BRI	2,766	77,300,000,024	17,678,353,783
Jumlah	3,066	109,005,755,824	33,338,437,794

Sumber: SIKP Kementerian Keuangan (data diolah)

C. PROGNOSES REALISASI APBN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2019

Sampai dengan akhir tahun 2019, diperkirakan terdapat beberapa faktor utama yang



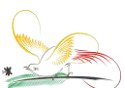
mempengaruhi pencapaian realisasi APBN di Provinsi Papua Barat, yaitu:

- ✚ Perekonomian global mulai memasuki keseimbangan baru (*rebalancing*) akibat pulihnya perekonomian negara maju;
- ✚ Kapasitas SDM relatif kurang memadai sehingga perencanaan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- ✚ Mutasi/ pergantian pejabat perbendaharaan;
- ✚ Mindset satuan kerja yang biasa mencairkan anggaran di akhir tahun.

Berdasarkan trend dua tahun terakhir (2017 - 2018) serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian realisasi APBN di Provinsi Papua Barat, dapat diperkirakan realisasi pendapatan APBN sebesar Rp2.313,12 miliar (82,5 persen) dan belanja APBN sebesar Rp28.084,1 (98,5 persen). Sehingga pada tahun 2019, realisasi APBN lingkup Provinsi Papua Barat diperkirakan terjadi defisit sebesar – Rp25.770,9 miliar

Tabel 2.5
Prognosis Realisasi APBN Provinsi Papua Barat
s.d Triwulan IV 2019

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triw I		Perkiraan Realisasi s.d. Triw IV	
		Rp (miliar)	% Real	Rp (miliar)	% Real
Pendapatan APBN	2.803,78	468,88	16,72	2.313,12	82,50
Belanja APBN	28.511,77	4.754,47	16,68	28.084,10	98,50
Surplus Defisit		-4.285,58		-25.770,98	





Bab III

Perkembangan dan Analisis APBD

Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan membutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah untuk saat ini lebih didominasi oleh penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga ke depan secara bertahap diharapkan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua pengeluaran untuk pembangunan daerah dan sumber dana yang diperlukan tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam merencanakan sumber pendapatan dan alokasi belanja, pemerintah daerah harus melihat kebutuhan riil masyarakat berdasarkan potensi daerah dengan berorientasi pada kepentingan/ skala prioritas pembangunan. Selain itu, APBD merupakan salah satu pendorong (*key leverage*) bagi pertumbuhan ekonomi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

Secara total, target pendapatan maupun pagu belanja APBD tahun 2019 seluruh pemerintah daerah di Papua Barat mengalami kenaikan.

Pendapatan APBD Papua Barat tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp20.164,07 miliar atau naik

Tabel 3.1
Pagu Dan Realisasi APBD Seluruh Pemda Papua Barat s.d Triw I 2019 dan Triw I 2018
(miliar Rupiah)

Uraian	2018		2019	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	19.681,00	3.329,00	20.164,07	3.830,45
PENDAPATAN ASLI DAERAH	975,00	121,00	998,93	486,42
Pendapatan Pajak Daerah	438,00	61,00	448,75	213,49
Pendapatan Retribusi Daerah	102,00	8,00	104,50	9,18
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	92,00	32,00	94,26	0,05
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	343,00	20,00	351,42	263,70
PENDAPATAN TRANSFER	17.819,00	3.130,00	18.256,37	3.171,06
Dana Bagi Hasil Pajak	933,00	-	955,90	45,63
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	884,00	247,00	905,70	612,97
Dana Alokasi Umum	7.438,00	2.658,00	7.620,57	2.348,97
Dana Alokasi Khusus	1.935,00	70,00	1.982,49	74,51
Dana Otonomi Khusus	5.794,00	-	5.936,21	1,13
Dana Penyesuaian	219,00	-	224,38	11,30
Dana Desa	247,00	139,00	253,06	39,49
Transfer Pemerintah Provinsi	248,00	16,00	254,09	1,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	887,00	78,00	908,77	172,97
BELANJA	19.156,00	1.222,00	19.626,18	1.513,57
Belanja Pegawai	4.709,00	593,00	4.824,58	721,43
Belanja Barang	5.465,00	219,00	5.599,14	446,61
Belanja Bunga	19,00	2,00	19,47	8,66
Belanja Subsidi	25,00	6,00	25,61	7,24
Belanja Hibah	979,00	116,00	1.003,03	145,42
Belanja Bantuan Sosial	444,00	51,00	454,90	97,09
Belanja Bantuan Keuangan	1.392,00	66,00	1.426,17	-
Belanja Modal	6.094,00	168,00	6.243,58	86,08
Belanja Tak Terduga	29,00	1,00	29,71	1,03
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	3.424,00	47,00	3.508,04	121,37
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	22.580,00	1.269,00	23.134,23	1.634,95
SURPLUS / DEFISIT	(2.899,00)	2.060,00	(2.970,16)	2.195,50



2,45 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya kenaikan yang cukup signifikan pada target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, pagu belanja APBD tahun 2019 mencapai Rp19.626 miliar. Peningkatan pagu belanja tersebut dikarenakan terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada belanja pegawai. Penyebabnya, pada tahun 2019 perhitungan pembayaran gaji pokok terdapat kenaikan sebesar 5 persen. Di samping itu, terdapat kenaikan pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada sebagian pemerintah daerah.

Adapun total realisasi pendapatan APBD seluruh pemerintah daerah di Papua Barat sampai dengan triwulan I 2019 mencapai Rp3.830,45 miliar atau 18 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp1.513 miliar atau 7,7 persen dari target.

A. PENDAPATAN DAERAH

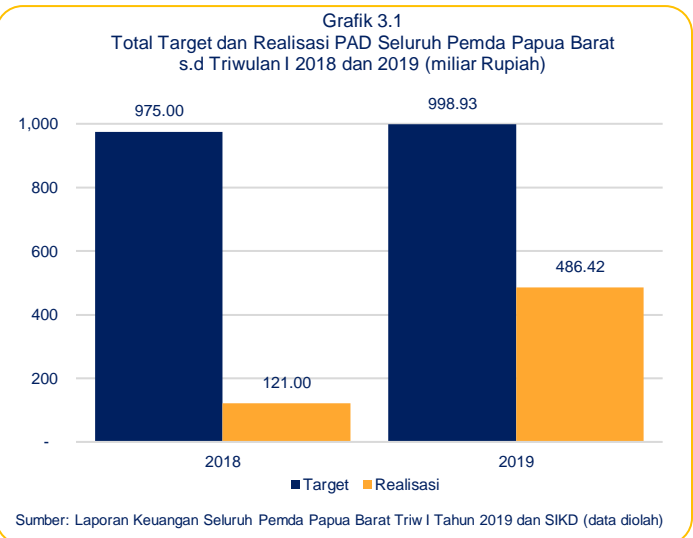
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

A.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besaran PAD dalam postur APBD merupakan indikator kemandirian daerah. Komponen PAD Provinsi Papua Barat terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

PAD yang sah.

Target PAD seluruh pemerintah daerah di Papua Barat pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp448,75 miliar dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah Rp438 miliar. Dari target tersebut, telah terealisasi sebesar Rp213,49 miliar hingga triwulan I 2019. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel grafik 3.1.



A.1.1 Pajak Daerah

Sampai dengan Triwulan I tahun 2019, total realisasi penerimaan pajak daerah di Papua Barat sebesar Rp213 miliar atau 47 persen dari target yang ditetapkan. Pemerintah daerah yang memiliki realisasi penerimaan pajak daerah terbesar yaitu Provinsi Papua Barat mencapai Rp170 miliar. Penerimaan pajak daerah Provinsi Papua Barat tersebut disumbang oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang mana secara kuantitas kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan.

A.1.2 Retribusi Daerah

Total realisasi penerimaan retribusi daerah seluruh pemerintah daerah di Papua Barat sampai dengan triwulan I tahun 2019 mencapai Rp9,18 miliar atau 8,78 persen dari target yang ditetapkan. Daerah yang memiliki realisasi penerimaan retribusi daerah terbesar yaitu Kota Sorong mencapai Rp2,5 miliar.



A.1.3 Lain-Lain PAD yang Sah

Sampai dengan triwulan I tahun 2019 total penerimaan Lain-lain PAD yang Sah seluruh pemerintah daerah di Papua Barat sebesar Rp263 miliar atau mencapai 75 persen dari target yang ditetapkan. Daerah yang memiliki realisasi tertinggi penerimaan lain-lain PAD yang sah yaitu Kab Kaimana mencapai Rp228,3 miliar.

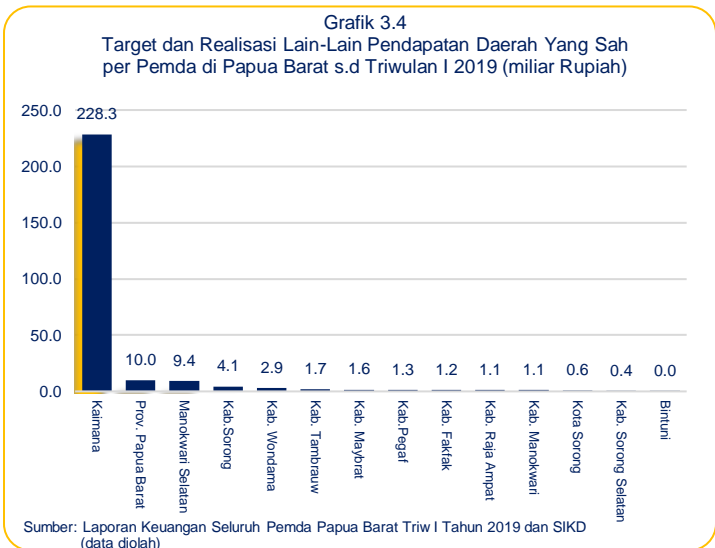
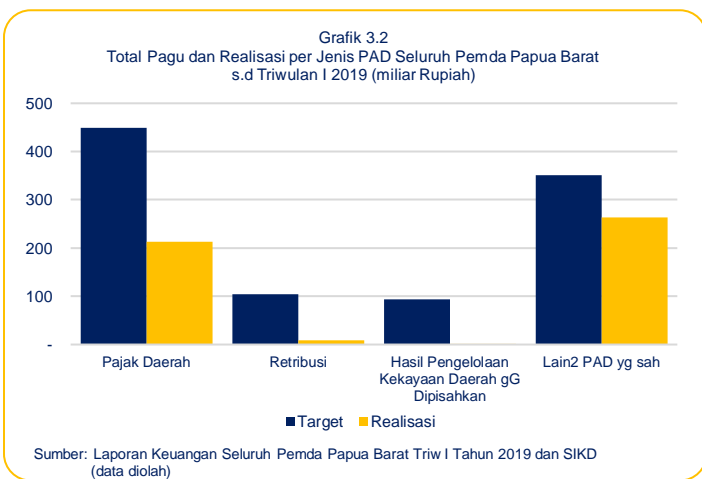
A.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seluruh pemerintah daerah di Papua Barat sampai dengan triwulan I tahun 2019 sebesar Rp50 juta atau mencapai 0,05 persen dari target yang ditetapkan.

tahun 2018 yang berjumlah Rp17.819 miliar. Dari seluruh komponen pendapatan transfer, porsi terbesar yaitu DAU sebesar Rp7.620 miliar (41,7 persen). Sampai dengan triwulan I 2019, daerah yang memiliki realisasi pendapatan transfer tertinggi di Papua Barat yaitu Provinsi Papua Barat Rp1.048 miliar.

A.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sampai dengan triwulan I 2019, total realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah seluruh pemerintah daerah di Papua Barat mencapai Rp172,97 miliar. Daerah yang memiliki realisasi terbesar adalah Kabupaten Kaimana sebesar Rp 228 miliar.

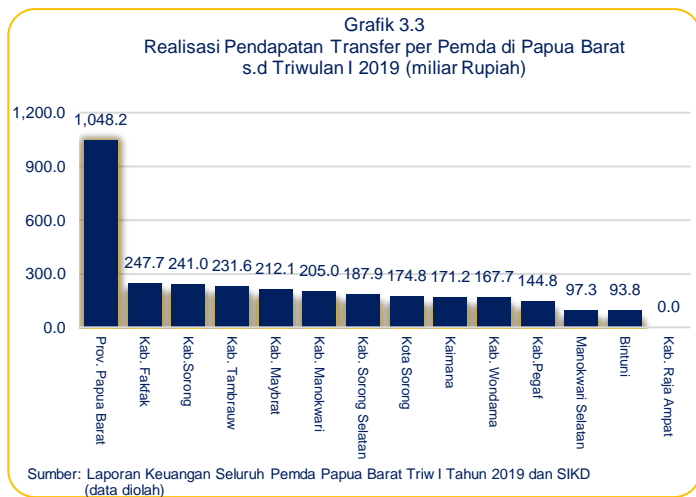


A.2 Pendapatan Transfer

Total target pendapatan transfer seluruh pemerintah daerah di Papua Barat tahun 2019 sebesar Rp18.256,37 miliar dibandingkan dengan

B. BELANJA DAERAH

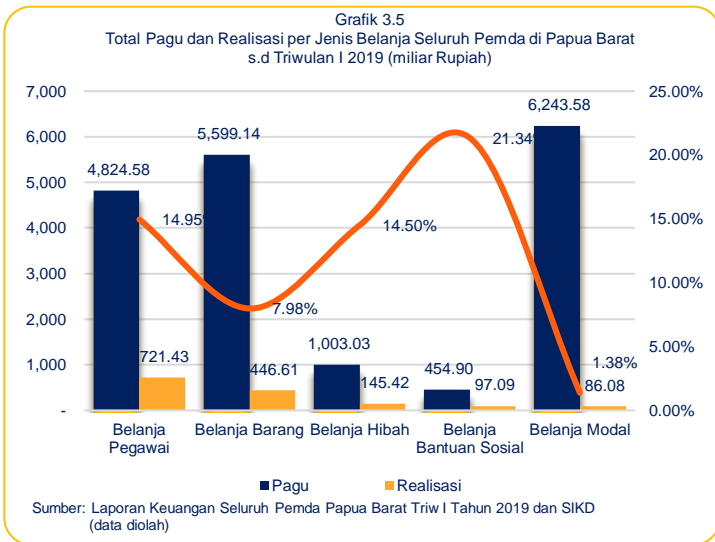
Total pagu belanja daerah tahun 2019 seluruh pemerintah daerah di Papua Barat mencapai Rp19.628,18 miliar. Berdasarkan jenisnya, belanja daerah terbesar yaitu belanja modal mencapai Rp6.243,58 miliar dan belanja barang mencapai Rp5.599 miliar.



Sampai dengan triwulan I 2019, total realisasi belanja daerah di Papua Barat relatif masih rendah yaitu sebesar Rp1.514 miliar. Untuk realisasi belanja daerah tertinggi yaitu belanja pegawai sebesar Rp721,43 miliar dan belanja barang sebesar Rp446,61 miliar. Sementara itu, belanja



modal telah baru terealisasi sebesar Rp86,08 miliar.



C. PROGNOISIS REALISASI APBD SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2019

Sampai dengan akhir tahun 2019, diperkirakan terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Papua Barat, yaitu:

- ✚ Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah dari target yang ditetapkan karena tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam (*raw material*), dimana pasar komoditi internasional masih dalam kondisi pemulihan (*economic recovery*).
- ✚ Kapasitas SDM relatif kurang memadai sehingga pelaksanaan anggaran tidak berjalan optimal.
- ✚ Keterlambatan penetapan SK penunjukan/ penggantian pejabat perbendaharaan.
- ✚ Keterbatasan jumlah SDM yang berminat menjadi panitia pengadaan barang dan jasa karena takut berurusan dengan pihak berwajib.
- ✚ Keterbatasan pejabat pengadaan yang bersertifikat.
- ✚ Sering terjadi mutasi / pergantian pejabat terkait dengan pengelolaan keuangan di SKPD.
- ✚ Keterlambatan usulan pengadaan dari SKPD ke ULP (Unit Layanan Pengadaan).

- ✚ Masih banyak daerah rawan konflik dan masalah pembebasan tanah.
- ✚ Proses pengadaan yang terlalu panjang/ lama.

Berdasarkan trend realisasi APBD Papua Barat pada dua tahun terakhir (2016-2017) dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi, maka diperkirakan realisasi APBD sampai dengan akhir 2018 sebagai berikut:

Berdasarkan tabel prognosis realisasi APBD tersebut, dapat dijelaskan bahwa dengan melihat tren realisasi pendapatan pada tahun 2017 dan 2018 yang berkisar antara 100 – 105 persen, maka perkiraan realisasi pendapatan daerah seluruh pemerintah daerah di Papua Barat sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai Rp21.172 miliar atau 105 persen. Sementara itu, dengan melihat tren realisasi belanja tahun 2017 dan 2018 yang berkisar antara 85 - 90 persen, maka perkiraan realisasi belanja daerah sampai akhir tahun 2019 mencapai Rp19,39 triliun atau 90 persen. Sehingga pada tahun 2019, realisasi APBD lingkup Provinsi Papua Barat diperkirakan terjadi surplus anggaran sebesar Rp1.840 miliar.

Tabel 3.2
Prognosis Realisasi APBD Prov. Papua Barat s.d Triwulan IV Tahun 2019

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Tr I 2019		Perkiraan Realisasi s.d. Tr IV 2019	
		Rp (miliar)	% Real	Rp (miliar)	% Real
Pendapatan Daerah	20.164,07	3.830,45	19,00	21.172	105
Belanja Daerah	19.626,18	1.513,57	7,71	19.332	90
Surplus / Defisit		2.316,88		1.840,48	



PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam periode waktu tertentu.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Konsolidasi Tingkat Wilayah Papua Barat
Periode Triwulan I 2018 dan Triwulan I 2019

Uraian	Triwulan I 2018	Realisasi Triwulan I 2019		
	Konsolidasi	Pusat	Daerah	Konsolidasi
Penerimaan Pendapatan	553	469	(71)	398
Perpajakan	329	389	213	602
Pendapatan Bukan Pajak	208	80	446	526
Hibah	-	-	-	-
Transfer	16	-	3.171	(731)
Pengeluaran Belanja	2.063	4.754	1.635	6.389
Belanja Pemerintah	2.016	853	1.514	2.366
Transfer	47	3.902	121	4.023
Surplus / Defisit	(1.511)	(4.286)	(1.706)	(5.992)

Sumber: OM-SPAN, LRA Pemda dan SIKD (data diolah)

Sampai dengan triwulan I 2019, realisasi penerimaan pendapatan konsolidasian di Papua Barat sebesar Rp398 miliar. Sementara itu, realisasi pengeluaran belanja konsolidasian mencapai Rp6.389 miliar. Sehingga pada periode ini terjadi defisit sebesar -Rp5.992 miliar

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan pemerintahan umum (*General Government Revenue*) atau pendapatan konsolidasian tingkat wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

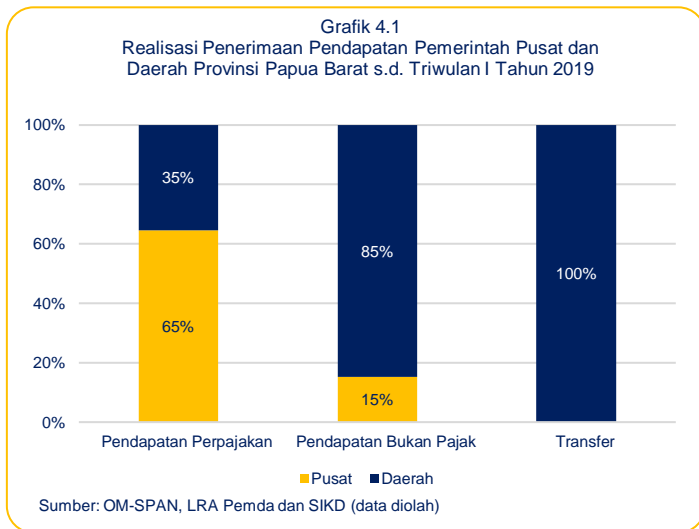
B.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Target pendapatan perpajakan konsolidasian Papua Barat tahun 2019 sebesar Rp3.030,63 miliar yaitu pendapatan perpajakan pusat Rp2.581,88 miliar dan pendapatan perpajakan daerah sebesar Rp448,75 miliar. Untuk target perpajakan pusat turun dari tahun sebelumnya yang didasarkan pada asumsi bahwa kondisi perekonomian pada tahun 2019 masih dalam tahap pemulihan (*economic recovery*). Selain itu, tantangan dan dinamika yang cukup berat mengingat volatilitas harga komoditas internasional seperti minyak dan gas bumi turut mempengaruhi target penerimaan pajak di Papua Barat.

Sampai dengan triwulan I 2019, realisasi pendapatan pemerintah pusat tertinggi yaitu berasal dari pendapatan perpajakan sebesar



Rp388,95 miliar. Sementara itu, pendapatan pemerintah daerah berasal dari pendapatan transfer mencapai Rp3.171,06 miliar.



B.2 Analisis Perubahan

Bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sampai dengan triwulan I 2019 terjadi (*growth*) pertumbuhan realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian sebesar 83 persen dari Rp328 miliar menjadi Rp602 miliar disebabkan terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada pendapatan PPN Dalam Negeri dan pajak penghasilan. Selain itu, terjadi kenaikan realisasi pendapatan bukan pajak konsolidasian disebabkan terjadi peningkatan pada realisasi pendapatan jasa pelayanan kebandarudaraan dan jasa pelayanan kepelabuhanan.

Tabel 4.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Papua Barat Periode Triwulan I 2018 dan Triwulan I 2019

Uraian	2018			2019		
	Target 1 Thn (Miliar Rp)	Real Triw I (Miliar Rp)	%	Target 1 Thn (Miliar Rp)	Real Triw I (Miliar Rp)	%
Pemda	438	61	13,93	449	213	47,57
Pusat	2.854	267	9,36	2.582	389	15,06
Konsolidasian	3.292	328	9,96	3.031	602	19,88

Sumber: OM-SPAN, LRA Pemda dan SIKD (data diolah)

B.3 Analisis Realisasi Pendapatan Perpajakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode triwulan I tahun 2019, PDRB Riil Papua Barat sebesar Rp14,69 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,26 persen (*yoy*). Sementara itu pada periode yang sama, terjadi pertumbuhan realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian sebesar 83,7 persen. Berdasarkan perbedaan antara angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan perpajakan yaitu sebesar 83,96 persen [83,7 – (-0,26)], mengindikasikan bahwa pada triwulan I 2019 penerimaan perpajakan telah dioptimalkan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang kontraksi.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

C.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi belanja konsolidasian terbesar tahun 2019 Papua Barat yaitu belanja pemerintah mencapai 71,06 persen dari total pagu belanja konsolidasian. Sementara itu belanja transfer mencapai 28,93 persen.

Untuk pagu belanja pemerintah konsolidasian terjadi kenaikan pada tahun 2019 sebesar 9 persen dibandingkan pagu tahun 2018, yaitu dari Rp25.058 miliar menjadi Rp 27.326 miliar. Alokasi belanja APBN 2019 yang naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan anggaran di daerah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga dan belanja daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).



C.2 Analisis Perubahan

Jika dilihat per jenis belanja, sampai dengan triwulan I 2019, realisasi belanja konsolidasian tertinggi yaitu belanja bantuan sosial dan belanja pegawai masing-masing mencapai 21 persen dan 16 persen. Sementara itu realisasi belanja modal konsolidasian terlihat belum optimal dibandingkan dengan belanja yang lain, sehingga diperlukan akselerasi untuk merealisasikan belanja tersebut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

Tabel 4.3
Perbandingan Realisasi Belanja Konsolidasian Papua Barat
Periode Triwulan I 2018 dan Triwulan I 2019

Uraian	2018			2019		
	Pagu 1 Thn (Miliar Rp)	Real Tr I (Miliar Rp)	%	Pagu 1 Thn (Miliar Rp)	Real Tr I (Miliar Rp)	%
Belanja Pegawai	6.163,67	873,14	14,17	6.492,48	1.057,47	16,29
Belanja Barang	7.686,00	505,00	6,57	8.436,01	809,34	9,59
Belanja Modal	8.292,00	393,00	4,74	9.409,46	238,64	2,54
Belanja Sosial	458,78	53,00	11,55	468,28	98,56	21,05
Belanja Lainnya	2.457,98	191,05	7,77	2.519,87	162,36	6,44

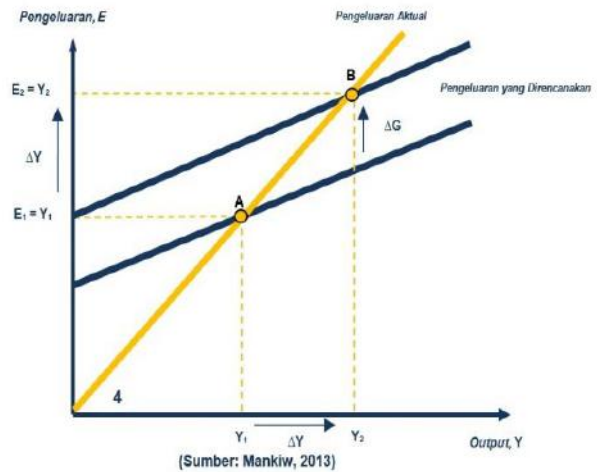
Sumber: OM-SPAN, LRA Pemda dan SIKD (data diolah)

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Berdasarkan Teori Perpotongan Keynesian (*Keynesian Cross Theory*), salah satu variabel yang berpengaruh terhadap pencapaian output (Y) yaitu belanja pemerintah (*government spending*). Kenaikan belanja pemerintah akan mendorong output menjadi lebih besar dimana ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B dan output meningkat dari Y_1 ke Y_2 (Mankiw, 2013).

Nilai output dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran *agregat* yaitu pengeluaran konsumen, pengeluaran investasi, pembelian pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor

Gambar Pengaruh Kenaikan Pengeluaran Pemerintah terhadap Output Menurut Perpotongan Keynesian



dikurangi impor (*net export*) yang ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Nilai output suatu daerah diwujudkan dalam bentuk PDRB. Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dilihat dari sisi belanja, dihitung dengan cara membandingkan nilai pengeluaran pemerintah terhadap PDRB. Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap PDRB. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Kontribusi Pemerintah Terhadap PDRB Provinsi Papua Barat s.d Triwulan I 2019

Uraian	Realisasi
Belanja Konsolidasian (miliar Rupiah)	6.389
PMTB (miliar Rupiah)	2.500
PDRB (miliar Rupiah)	14.690
Kontribusi Belanja Konsolidasian terhadap PDRB (%)	43,49
Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	17,02



Sampai dengan triwulan I 2019, kontribusi belanja pemerintah konsolidasian terhadap PDRB Provinsi Papua Barat sebesar Rp6,3 triliun / Rp14,69 triliun =43,49 persen. Adapun kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB sebesar Rp2,5 triliun / Rp14,69 triliun = 17,02 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi belanja pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah cukup signifikan terhadap perekonomian Papua Barat.

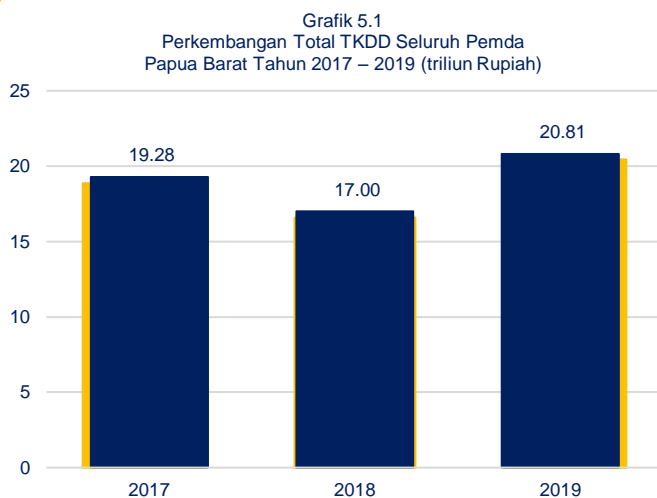


Bab V

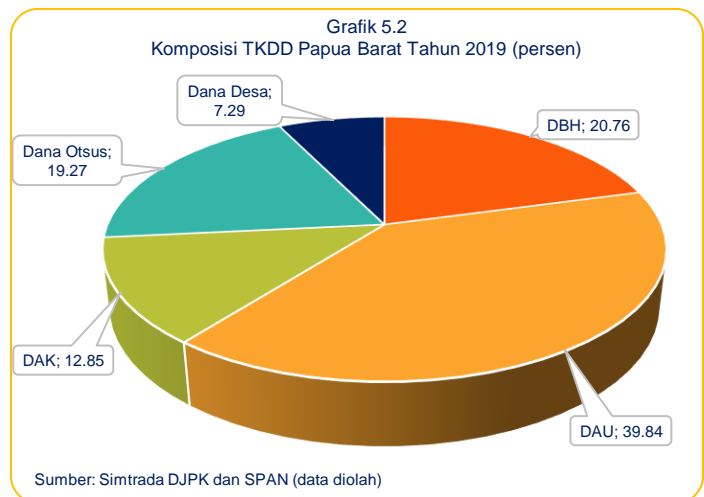
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Sebagai bentuk penguatan desentralisasi fiskal, dana yang diberikan kepada Provinsi Papua Barat dalam bentuk TKDD semakin meningkat tiap tahun. Pada tahun 2017 total TKDD seluruh pemerintah daerah di Provinsi Barat sebesar Rp19,28 triliun. Kemudian pada tahun 2019 nilainya mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp20,81 triliun atau naik sebesar 7,94 persen.

persen, Dana Otsus sebesar 19,27 persen, Dana Alokasi Khusus sebesar 12,85 persen dan Dana Desa sebesar 7,29 persen.



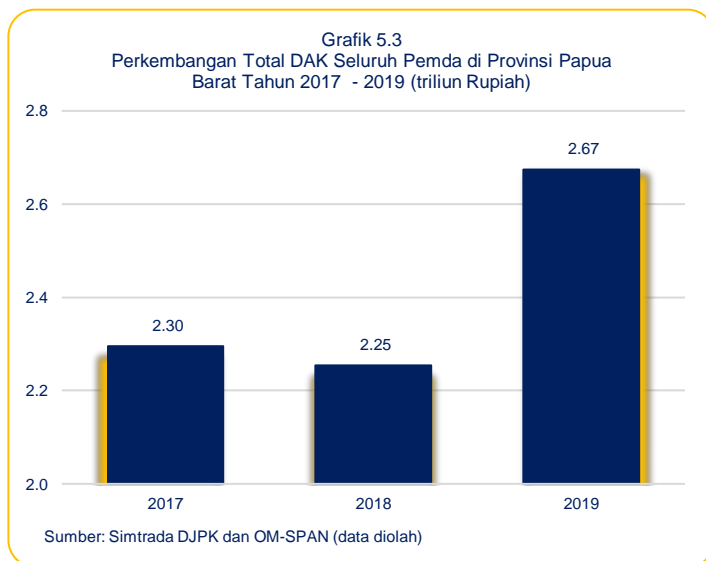
Berdasarkan komposisinya, komponen terbesar TKDD Papua Barat tahun 2019 yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 39,84 persen kemudian diikuti Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 20,76



Salah satu jenis dana transfer yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan salah satu mekanisme transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.



Berbeda dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat *block grant*, DAK bersifat *conditional grant*, artinya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan DAK. Dalam penggunaannya, daerah harus mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Selain itu DAK juga bersifat *close-end grant*, artinya dana yang diterima untuk satu tahun anggaran sudah ditentukan dari awal tahun anggaran. Apabila sampai akhir tahun anggaran daerah tidak dapat menggunakannya sesuai dengan petunjuk teknis, maka sisanya tidak dapat disalurkan. DAK yang ditransfer kepada Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2017, DAK yang diterima Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,3 triliun. Kemudian nilainya meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp2,67 triliun atau naik sebesar 16,1 persen.



A. Penyaluran DAK Fisik

TKDD yang diterima Pemerintah Daerah ditransfer secara terpusat melalui KPPN Jakarta II ke seluruh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun mulai tahun 2017, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, khusus penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan oleh seluruh KPPN yang berada di daerah. DAK Fisik disalurkan melalui KPPN di daerah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD.

Sementara itu, mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD Pada tahun 2019, total DAK Fisik yang dialokasikan kepada seluruh Pemda di Provinsi Papua Barat sebesar Rp1,82 triliun. Alokasi tertinggi diberikan kepada Pemda Provinsi Papua Barat sebesar Rp204,91 miliar, sedangkan terendah diberikan kepada Pemda Kab. Kaimana sebesar Rp60,65 miliar.

DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik bertahap, DAK Fisik sekaligus, dan DAK Fisik yang tidak bisa dibayar dengan mekanisme bertahap. Pada tahun 2019, jumlah bidang untuk DAK Fisik bertahap sebanyak 231 bidang yang terdiri dari 192 bidang DAK Fisik bertahap, 21 bidang DAK Fisik sekaligus, dan 18 bidang yang tidak bisa dibayar dengan mekanisme bertahap. Sampai dengan triwulan I 2019 dana DAK Fisik tersebut belum terdapat penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD untuk seluruh daerah di Papua Barat.

Tabel 5.1
Pagu dan Realisasi DAK Fisik per Pemda di Papua Barat s.d Triwulan I 2019 (miliar Rupiah)

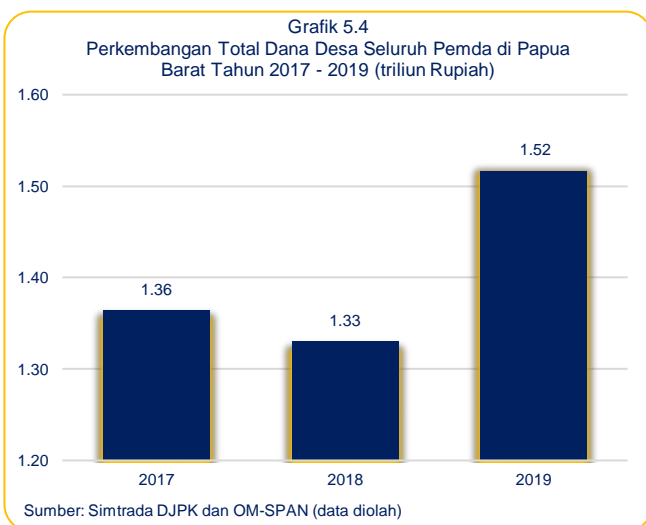
Pemda	Pagu	Salur
Prov. Papua Barat	204,91	-
Kab Manokwari	138,59	-
Kab Mansel	83,90	-
Kab T. Bintuni	107,01	-
Kab T. Wondama	140,29	-
Kab Pegaf	103,08	-
Kota Sorong	85,78	-
Kab Sorong	201,43	-
Kab Sorsel	106,85	-
Kab Raja Ampat	193,87	-
Kab Tambrauw	175,23	-
Kab Maybrat	135,82	-
Kab Fakfak	80,75	-
Kab Kaimana	60,65	-
Total	1.818,17	-

Sumber: OM-SPAN



B. Penyaluran Dana Desa

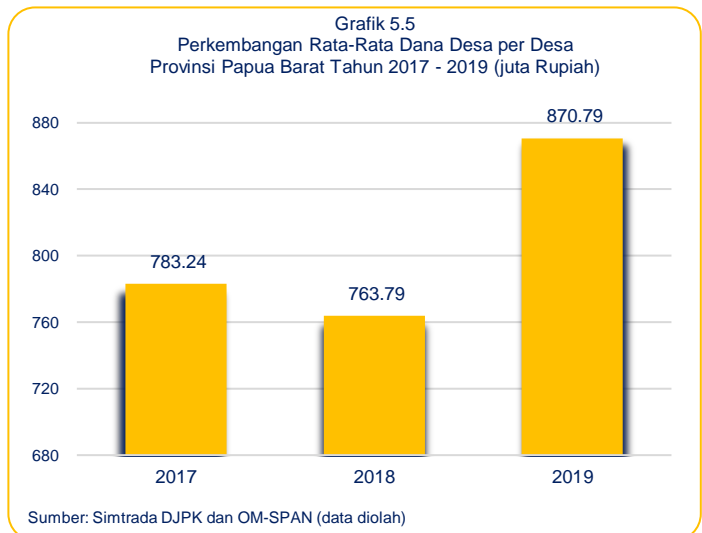
Dana desa merupakan dana dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya dengan DAK, secara konseptual Dana Desa bersifat *conditional grant*, artinya penggunaan Dana Desa dibatasi oleh persyaratan tertentu. Penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Desa PDTT dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/ walikota.



Jumlah dana desa yang diterima seluruh Pemda di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2017 dana desa yang disalurkan ke Provinsi Papua Barat sebesar Rp1,36 triliun. Kemudian pada tahun 2019 nilainya meningkat menjadi Rp1,52 triliun atau naik 11,7 persen.

Demikian juga rata-rata dana desa yang diterima setiap desa di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan setiap tahun. Saat ini kebijakan yang ditempuh memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan melakukan perubahan komposisi perhitungan. Perhitungan tersebut merubah Alokasi Formula yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk,

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dinaikkan menjadi 25 persen. Selain itu, pada alokasi formula tersebut memberikan bobot yang lebih besar kepada angka kemiskinan menjadi 50 persen. Perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk: (1) menyesuaikan proporsi dana yang dibagi rata (alokasi dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (alokasi formula); (2) memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi; dan (3) memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.



Pada tahun 2017 rata-rata dana desa yang diterima tiap desa sebesar Rp783,24 juta. Kemudian pada tahun 2019 nilainya meningkat menjadi Rp870,79 juta. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah pusat yang semakin kuat untuk mencapai salah satu program nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan PMK 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran dana desa tahun 2019 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Pada



tahap I, sebesar 20 persen. Selanjutnya pada tahap II dan tahap III masing-masing sebesar 40 persen.

Penyaluran dana desa tahap I dilaksanakan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni minggu ketiga yaitu sebesar 20 persen dari total pagu dana Desa. Dari pagu tahap I sebesar Rp303.383.051.600, telah disalurkan sebesar Rp256.364.249.400, atau 84,50 persen dari pagu tahap I.

Pemda dengan pengajuan penyaluran paling cepat untuk dana desa Tahap I adalah Pemda Kabupaten Tambrauw yaitu pada tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah sebesar Rp35.393.953.400. Untuk pemda yang belum tersalur dana desa tahap I pada triwulan I ini sebanyak 5 pemda yaituh Pemda Kab. Manokwari dan Kab. Manokwari Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Fakfak, dan Kab. Kaimana. Dana desa tahap I untuk lima pemda tersebut baru disalur pada Bulan April dan Mei dikarenakan baru melengkapi Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa yang menjadi salah satu persyaratan penyaluran dana desa tahap I.

Tabel 5.1
Pagu dan Realisasi Dana Desa per Pemda di Papua Barat
s.d. Triwulan I 2019 (miliar Rupiah)

Pemda	Jumlah Desa	Pagu	Penyaluran	%
Kab Manokwari	164	140.85	-	0
Kab Mansel	57	112.65	22.53	20
Kab T. Bintuni	115	70.93	14.19	20
Kab T. Wondama	75	139.46	27.89	20
Kab Pegaf	166	60.75	-	0
Kab Sorong	226	175.05	35.01	20
Kab Sorsel	121	105.65	21.13	20
Kab Raja 4	117	104.77	-	0
Kab Tambrauw	216	197.47	39.49	20
Kab Maybrat	259	176.97	35.39	20
Kab Fakfak	142	138.14	-	0
Kab Kaimana	84	94.24	-	0
Total	1,742	1,516.92	256,36	16.90

Sumber: OMSPAN

C. Permasalahan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Secara umum masalah-masalah yang ditemukan dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada triwulan I 2019 sebagai berikut:

- ✚ Masih banyak pemerintah daerah yang belum memenuhi dokumen persyaratan DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana yang telah dipersyaratkan;
- ✚ Kendala teknologi informasi yang menghambat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa seperti jaringan internet yang lambat di beberapa daerah;
- ✚ Verifikasi KPPN atas data dan dokumen yang diupload pemerintah daerah ke OM-SPAN membutuhkan waktu dan ketelitian agar penyaluran DAK Fisik tidak ada yang terlewat atau tidak salur;
- ✚ Operator pemerintah daerah belum lancar mengoperasikan OM-SPAN;
- ✚ KPPN belum maksimal melatih operator pemerintah daerah dalam pengoperasian OM-SPAN, bahkan ada yang belum melakukan *training*;
- ✚ Pemerintah daerah telat melakukan proses lelang sehingga penyampaian daftar kontrak kegiatan menjadi terlambat dan progres pekerjaan sebagai prasyarat penyaluran triwulan berikutnya menjadi terhambat;
- ✚ Keberadaan tenaga pendamping dana desa kurang maksimal (tidak profesional dan tidak dapat menjangkau seluruh desa);
- ✚ Kompetensi aparatur desa yang rendah, menyebabkan keterlambatan penyusunan RKPDes dan APBDes, sehingga dana desa belum dapat disalurkan ke RKD;
- ✚ Kondisi geografis daerah yang sulit dan menantang menyebabkan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kurang optimal;

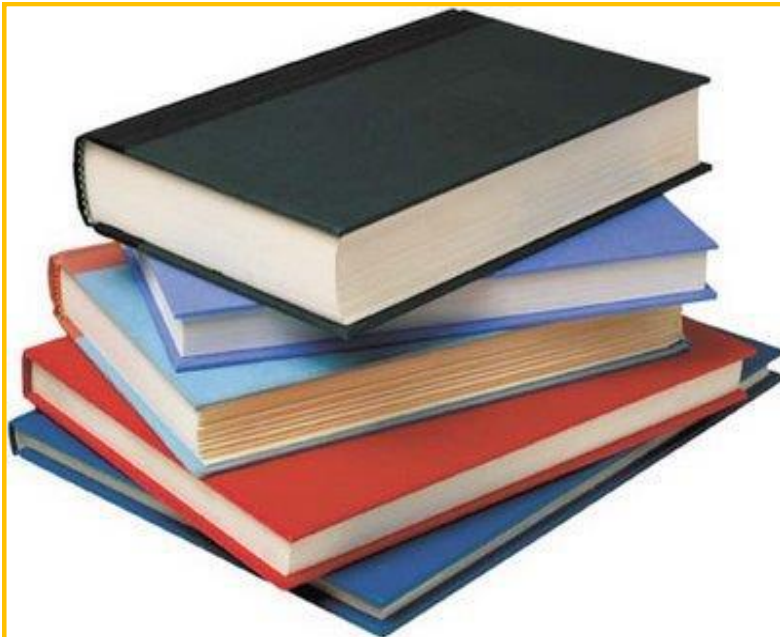
D. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan perkembangan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan triwulan I tahun 2019 serta identifikasi permasalahan yang ada,



rekomendasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat diantaranya:

- ✚ Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pemerintah daerah (kepala daerah) terutama mengenai mekanisme dan persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- ✚ Diperlukan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada petugas teknis pemerintah daerah;
- ✚ Diperlukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara (*In Depth Interview*) kepada pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa.



DAFTAR PUSTAKA

Blanchard, Oliver. (2006). *Macroeconomics—forth edition*. New Jersey: Prentice Hall.

Krugman, P., & Wells R. (2011). *Economics-Second Edition*. London: Worth Publishers.

Mankiw, Gregory N. (2013). *Macroeconomi-eight edition*. London: Worth Publisher.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah PMK Nomor 112/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Ravallion, Martin. (1995). *Growth and Poverty: Evidence for Developing Countries in The 1990s*. *Economics Letters*. Vol. 48 (June): 411-417.

Seyoum, B. (2009). *Export-Import Theory, Practices, and Procedures -Second Edition*. New York: Routledge.



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Arfai, Kab. Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124
e-mail: kanwildjbn.papuabarat@gmail.com
website: djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/papuabarat



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

KANTOR WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124, e-mail: kanwildjbn.papua Barat@gmail.com
website: djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/papua Barat

NOTA DINAS

Nomor: ND - 230 /WPB.33/2019

Yth : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Hal : Penyampaian KFR Triwulan I Tahun 2019
Tanggal : 09 Mei 2019

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, berikut disampaikan KFR Triwulan I Tahun 2019 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Adapun softcopy dalam format *pdf* telah kami kirim melalui email lo.ditpa@gmail.com dan ditpa@kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,


Arif Wibawa